

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015-2019

Nuzulul Siswo Abdulaziz¹

*Email : Nuzululaziz@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya¹

Abstract This study will answer questions about the level of efficiency and effectiveness of the Surabaya City Government's regional finance for the 2015-2019 fiscal year and how the level of regional financial independence of the Surabaya City Government for the 2015-2019 fiscal year. This study uses a descriptive research method with a quantitative approach. The data used is secondary data that comes from the website of the Surabaya City Financial and Regional Tax Management Agency. The data analysis technique uses financial ratios. The results of this study are that when viewed from the level of efficiency, it shows that the regional finances of the Surabaya City Government. For the 2015-2019 fiscal year, the Surabaya City's regional finances are classified as less efficient and inefficient, because the efficiency ratio is between 90%-100% and more than 100%. Judging from the level of effectiveness of the performance of the Surabaya City Government, it is categorized as very effective in managing the realization of Surabaya City's revenue, because the average is at the maximum value of the effectiveness ratio, which is above 100%. Meanwhile, when viewed from the level of regional financial independence, it shows that the level of dependence of the Surabaya City Government on the Central Government is in the delegative category, namely there is no intervention from the Central Government, because the average value of the Surabaya City Government's regional financial independence for the 2015-2019 fiscal year is 166,23%. **Keywords:** Regional Financial Performance, Efficiency, Effectiveness and Independence of Regional Finance.

Abstrak Penelitian ini akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019 dan bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan ialah data sekunder yang berasal dari situs web Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Teknik analisis data menggunakan rasio keuangan. Hasil penelitian ini ialah jika dilihat dari tingkat efisiensi menunjukkan bahwa keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun anggaran 2015-2019 keuangan daerah Kota Surabaya tergolong kurang efisien dan tidak efisien, karena rasio efisiensi berada antara 90%-100% dan lebih dari 100%. Ditinjau dari tingkat efektivitas kinerja Pemerintah Kota Surabaya masuk pada kategori sangat efektif dalam pengelolaan realisasi pendapatan Kota Surabaya, karena rata-rata berada pada nilai maksimum rasio efektifitas yaitu diatas 100%. Sedangkan bila ditinjau dari tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Surabaya terhadap Pemerintah Pusat berada pada kategori delegatif, yakni tidak ada campur tangan Pemerintah Pusat, dikarenakan nilai rata-rata kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019 sebesar 166,23%.

Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Efisiensi, Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah.

Pendahuluan

Indonesia memberlakukan kebijakan Otonomi Daerah sejak dibentuknya Undang-Undang No. 20 dan No. 25 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. APBD menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah pada aspek keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam menanggung kebutuhan daerahnya. Maka dibutuhkan sebuah pengukuran kinerja keuangan daerah agar digunakan sebagai parameter ketika menetapkan suatu kebijakan pada tahun anggaran berikutnya.

APBD merupakan tonggak dari sebuah perencanaan pembangunan suatu daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. APBD ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan Pemerintah Daerah sebagai catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam melaksanakan otonomi daerah. Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) menurut (Badrudin 2017) adalah sebuah perencanaan keuangan yang didalamnya berupa anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah dengan tujuan dapat menggapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan, sesuai dengan peraturan daerah APBD dinyatakan dalam bentuk satuan uang dilanjutkan dengan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengelolaan APBD harus memiliki standar yang digunakan sebagai acuan bahwa sebuah daerah dapat dikatakan mandiri, efektif dan efisien. Maka dibutuhkan sebuah pengukuran kinerja keuangan daerah agar digunakan sebagai parameter ketika menetapkan suatu kebijakan pada tahun anggaran berikutnya (Kurnia 2016).

Pengukuran kinerja merupakan sebuah cara untuk menghitung hasil capaian sebuah organisasi, pada konteks lembaga pemerintah atau biasa disebut sektor publik, keberhasilan suatu lembaga akan memberikan anggapan yang baik apresiasi dari masyarakat kepada lembaga tersebut. Sedangkan kinerja keuangan menurut (Mulyadi 2009) adalah sebuah pengamalan yang dipaparkan baik berhasil atau tidak pada kinerja operasional. Masyarakat biasanya hanya berfokus pada kinerja Pemerintah Pusat, dan sering mengabaikan kinerja pemerintah daerahnya. Padahal kinerja pemerintah daerah sangat penting untuk diketahui karena berhubungan langsung dengan keuntungan yang akan diperoleh masyarakat dalam menuju kehidupan yang sejahtera. Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengelola sendiri program kegiatan pemerintah dan urusan masyarakatnya. Maka itu Pemerintah Daerah harus bertanggung jawab atas kinerjanya.

Pemerintah Daerah pada umumnya berpacu untuk menghasilkan kinerja yang baik. Pemerintah Pusat khususnya kementerian dalam negeri selalu memberi *reward* dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang berhasil dalam kinerjanya mendukung otonomi daerah, dan juga memberikan *punishment* kepada Pemerintah Daerah apabila tidak dapat atau belum maksimal melaksanakan otonomi daerah (Peraturan Pemerintah RI 2008). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Junaidi, Muhammad dan Ronal yang menganalisis tentang pengaruh *Reward and Punishment* pada kinerja SDM Program Keluarga Harapan, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa adanya pemberlakuan *reward* dan *punishment* berpengaruh positif pada kinerja sumber daya manusia program keluarga harapan (Harahap, Muhammad, and Ronal 2020). Hal ini berarti, adanya program pemberian *reward* dan *punishment* oleh Kemendagri menjadikan Pemerintah Daerah termotivasi untuk menerapkan otonomi daerah secara optimal.

Keberhasilan otonomi daerah pada aspek keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam menanggung kebutuhan daerahnya. Mampu dalam artian tidak tergantung terlalu banyak pada dana transfer, baik dana dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi. Semakin kecil ketergantungan terhadap bantuan dana maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri. Maka satu-satunya harapan pemerintah daerah ialah

dengan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan agar keberhasilan keuangan daerah pada suatu daerah dapat tercapai dengan baik.

Kinerja didefinisikan oleh (Mardiasmo 2009) sebagai sebuah komparasi antara keberhasilan yang didapat dengan perencanaan yang dibentuk. Hal itu merupakan hal yang akurat untuk dijadikan indikator kinerja yang bisa digunakan sebagai latar belakang agar dapat menentukan keuangan daerah pada suatu daerah dapat dikatakan baik atau buruk. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat diukur melalui dua metode, yaitu pada aspek keuangan dan aspek non keuangan. Perhitungan kinerja melalui aspek keuangan bisa dilakukan dengan cara melihat riwayat keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui tiga aspek yaitu efisiensi, efektivitas dan kemandirian keuangan daerah. Menurut (Mardiasmo 2009) kinerja keuangan daerah yang dilihat dari segi ekonomis yaitu kebijakan pemerintah dalam mengadakan dan mendistribusikan sumber daya. Segi efisiensi ialah kemampuan pemerintah dalam meminimalkan belanja dan memaksimalkan pendapatan, efisiensi menurut (Bastian 2006) ialah sebuah keterkaitan antara input dengan output, anggaran yang digunakan untuk membeli barang dan jasa dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan. Efektivitas ialah keberhasilan pemerintah dalam menggunakan sumber daya dalam arti berhasil mencapai tujuan. Menurut (Mahmudi 2016) definisi dari efektivitas ialah membandingkan rencana yang diharapkan dengan hasil yang dicapai, efisiensi hanya fokus pada *output* atau proses sedangkan untuk efektivitas fokus pada *outcome* atau hasil. Kemandirian keuangan daerah adalah sebuah cara untuk mencerminkan tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah pada bantuan dana transfer. Pemerintah Daerah yang mampu dalam pembiayaan kebutuhan daerahnya sendiri maka dapat dikatakan daerah tersebut telah mandiri. Kebutuhan daerah yaitu berupa belanja pembangunan, belanja operasional atau rutin dan pelayanan publik. Kebutuhan daerah tersebut murni memanfaatkan PAD. Menurut (Halim 2002) pengukuran kemandirian keuangan daerah bisa dilakukan dengan membandingkan total pendapatan asli daerah dengan dana transfer.

Kota Surabaya termasuk wilayah terpadat di Provinsi Jawa Timur, kota yang mempunyai julukan Kota Pahlawan ini mempunyai karakteristik yang khas yaitu kulinernya yang beragam dan pusat perbelanjaan terbesar di Jawa Timur. Pusat perekonomian Jawa Timur juga bertempat di Kota Surabaya. Sehingga kota ini padat dengan bangunan-bangunan pusat industri, mall dan pusat perbelanjaan modern. Tidak heran bila pengunjung yang datang untuk bekerja atau sekedar mencari hiburan bukan hanya dari Kota Surabaya, melainkan dari luar kota, sehingga banyak transaksi yang terjadi di Kota Surabaya yang tentunya mempengaruhi pemasukan daerah yang diperoleh Kota Surabaya. Kota Surabaya dijadikan sebagai objek penelitian karena Kota Surabaya merupakan kota metropolitan yang dijadikan pusat bisnis dan pendidikan di Jawa Timur. Tentunya pendapatan asli daerah Kota Surabaya yang berasal dari pajak dan retribusi sangat tinggi, akan tetapi di sisi lain terdapat pula biaya belanja daerah Kota Surabaya yang terus meningkat terutama pada belanja langsung, dikarenakan Kota Surabaya membutuhkan pembangunan fasilitas publik yang lengkap dan memadai. Sehingga penelitian terhadap Pemerintah Kota Surabaya perlu dilakukan agar dapat mengetahui kinerja keuangan daerahnya yang dilihat dari sektor keuangan.

Tabel 1. 1 Realisasi APBD, Realisasi Total Belanja, Realisasi Total Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2015-2019

No	Tahun Anggaran	APBD (Rp)	Realisasi Total Belanja (Rp)	Realisasi Total Pendapatan (Rp)
1	2015	Rp 14.395.649.325.969	Rp 6.490.359.759.532	Rp 6.619.031.160.937
2	2016	Rp 15.372.358.815.563	Rp 7.151.661.549.430	Rp 6.825.754.275.892
3	2017	Rp 17.014.126.443.919	Rp 7.912.409.152.257	Rp 8.033.573.163.670
4	2018	Rp 17.554.143.811.648	Rp 8.176.929.496.299	Rp 8.175.219.120.669
5	2019	Rp 19.128.126.933.303	Rp 9.162.655.939.832	Rp 8.765.153.020.783

Sumber: Data Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya, diolah 2021.

Berdasarkan pada Tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa APBD Kota Surabaya pada tahun 2015 sebesar Rp 14.395.649.325.969 dengan Realisasi Total Pendapatan Rp 6.619.031.160.937 angka tersebut lebih tinggi dari Realisasi Total Belanja sebesar Rp 6.490.359.759.532. Pada tahun 2016 jumlah APBD sebesar Rp 15.372.358.815.563 dengan Realisasi Total Pendapatan sebesar Rp 6.825.754.275.892 sedangkan Realisasi Total Belanjanya sebesar Rp 7.151.661.549.430, sehingga diketahui pada tahun 2016 Realisasi Total Belanja lebih tinggi daripada Realisasi Total Pendapatan, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pada anggaran belanja hibah dan pengadaan tanah yang berguna untuk pelayanan masyarakat (Siregar 2016). Pada tahun 2017 jumlah APBD sebesar Rp 17.014.126.443.919 dengan Realisasi Total Pendapatannya sebesar Rp 8.033.573.163.670, angka tersebut lebih besar dari Realisasi Total Belanja dengan angka Rp 7.912.409.152.257. Pada tahun 2018 jumlah APBD sebesar Rp 17.554.143.811.648 dengan Realisasi Total Pendapatan sebesar Rp 8.175.219.120.669 dan Realisasi Total Belanja sebesar Rp 8.176.929.496.299. Diketahui pada tahun 2018 Realisasi Total Belanja lebih besar daripada Realisasi Total Pendapatan, hal ini dikarenakan pada tahun 2018 Pemerintah Kota Surabaya menambah anggaran untuk pembiayaan gaji pegawai kontrak dan pengadaan makam di Kecamatan Keputih untuk mengutamakan program infrastruktur (Rozack 2018). Pada tahun 2019 jumlah APBD sebesar Rp 19.128.126.933.303 dengan Realisasi Total Pendapatan sebesar Rp 8.765.153.020.783 dan Realisasi Total Belanja sebesar Rp 9.162.655.939.832. Pada tahun 2019 Realisasi Total Belanja lebih besar daripada Realisasi Total Pendapatan, hal ini disebabkan karena Pemerintah Surabaya pada tahun 2019 lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur pada bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu Pemerintah juga berfokus untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, UMKM dan perusahaan yang baru merintis, sehingga anggaran pada belanja cenderung meningkat (Purnomo 2019).

Sebagaimana yang telah dikemukakan peneliti diatas, akibat dari adanya otonomi daerah ialah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat mengatur keuangan daerah otonomnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk membiayai kebutuhan daerahnya, serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sehingga Pemerintah Daerah harus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengatur Belanja Daerah agar sesuai dengan anggaran dan tidak sampai defisit pada APBD. Adapun upaya untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah dalam mengatur belanja daerahnya ialah dengan cara melihat tingkat ekonomis anggaran belanja. Tingkat ekonomis digunakan untuk melihat sejauh mana Pemerintah Daerah dalam melakukan penghematan dan menjauhi pengeluaran yang berlebihan dan tidak produktif (Kurnia 2016). Menurut Kemendagri apabila tingkat ekonomis berada di bawah 60% masuk pada kategori sangat ekonomis, 80-90% masuk kategori cukup ekonomis, 90-100% termasuk kategori kurang

ekonomis dan jika berada di atas 100% maka termasuk pada kategori tidak ekonomis (Kepmendagri 1996). Untuk mengetahui tingkat ekonomis Pemerintah Kota Surabaya dalam menggunakan belanja daerahnya pada tahun anggaran 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1. 2 Pengukuran Tingkat Ekonomis Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2019

TAHUN	(EKONOMIS) BELANJA		%
	ANGGARAN	REALISASI	
2015	7.928.337.395.393,00	6.490.359.759.532,00	81,86
2016	8.115.231.350.395,00	7.151.661.549.430,48	88,13
2017	8.963.930.686.060,00	7.912.409.152.257,09	88,27
2018	9.268.450.333.673,00	8.176.929.496.298,63	88,22
2019	9.933.509.442.785,00	9.162.655.939.831,57	92,24

Sumber: Data Diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2015-2018 tingkat ekonomis Kota Surabaya berada di rata-rata 86% sehingga masuk pada kategori cukup ekonomis dan pada tahun 2019 tingkat ekonomis Kota Surabaya berada pada 92,24% sehingga masuk pada kategori kurang ekonomis. Hal ini berarti Pemerintah Kota Surabaya masih kurang dalam melakukan penghematan pada anggaran belanja.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kurnia 2016) mengenai analisis kinerja keuangan dengan menggunakan metode *value for money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang menunjukkan hasil penelitian bahwa kinerja keuangan Kota Palembang pada tingkat ekonomis masuk kategori ekonomis dan cukup ekonomis, dikarenakan tingkat rasio ekonomis berada diantara 80%-90%. Pada tingkat efisiensi masuk pada kategori kurang efisien dan tidak efisien, dikarenakan rasio efisiensi antara 90%-100%. Dan pada tingkat efektivitas masuk pada kategori sangat efektif dikarenakan rasio efektivitas lebih dari 100% dan pada tahun anggaran 2013-2015 dikategorikan efektif karena rasio efektivitas diatas 90%.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Kurnia 2016), dalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang baik tidak hanya berfokus pada tingkat ekonomis saja, yang dilihat dari segi hemat dan cermat dalam pengadaan alokasi sumber daya, melainkan kinerja keuangan daerah juga harus dilihat dari segi berdaya guna dalam penggunaan sumber daya yaitu dengan pengukuran tingkat efisiensi, kemudian dari segi berhasil guna dalam mencapai tujuan dan sasaran yaitu dengan pengukuran tingkat efektivitas, serta dari segi ketergantungan terhadap bantuan dana transfer yaitu dengan pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah.

Ditinjau dari tingkat ekonomis, Pemerintah Kota Surabaya masih kurang maksimal dalam penghematan anggaran belanja daerah, maka perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kinerja keuangan daerah dari tingkat efisiensi, tingkat efektivitas dan tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya supaya dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan serta pengelolaan anggaran terkait keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya di tahun-tahun selanjutnya, serta Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat melakukan pembangunan secara merata ke seluruh Kota Surabaya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Surabaya, agar pembangunan tidak hanya berpusat di titik tertentu, mengingat keberhasilan pada era otonomi daerah ini sangat bergantung pada bagaimana Pemerintah Daerah mengolah daerahnya, baik dari internal maupun eksternal. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis diatas, maka peneliti merumuskan masalah yakni bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas

keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2019 dan bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2019.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, pengertian dari penelitian deskriptif ialah penelitian yang menggambarkan suatu fenomena sesuai dengan keadaan yang terjadi di lokasi penelitian. Penelitian deskriptif menurut (Nazir 2003) ialah sebuah teknik untuk meneliti golongan manusia, kondisi dan peristiwa yang terjadi pada masa sekarang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang berupaya memaparkan gejala, fenomena dan kondisi yang sedang terjadi dimana peneliti dapat memotret dan memaparkan suatu peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian. Pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan dengan cara mendeskripsikan sebuah peristiwa dalam bentuk angka. Menurut (Sugiyono 2017) pendekatan kuantitatif berguna untuk membuktikan sebuah hipotesis yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti dengan menentukan populasi dan sampel lalu mengumpulkan data dan dianalisis dengan cara kuantitatif/statistik.

Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah pada tahun 2021 yang bertempat di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran yang diambil langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, serta dari berbagai situs web resmi Pemerintah Daerah Kota Surabaya yang berhubungan dengan judul penelitian. Data Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan pada penelitian ini ialah data tahun 2015-2019. Populasi adalah kumpulan manusia atau keadaan tertentu yang memiliki karakteristik. Sedangkan sampel ialah bagian dari populasi tersebut yang dipilih sebagai perwakilan dari karakteristik tersebut. Penelitian ini menggunakan populasi data Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya tahun 2015-2019 dan sampel yang dibutuhkan penelitian ini ialah pada aspek data anggaran total pendapatan, realisasi total pendapatan, realisasi total belanja, realisasi total PAD dan total pendapatan transfer tahun anggaran 2015-2019.

Peneliti menggunakan data dalam bentuk time series yang ditulis per tahun yakni dari tahun 2015 sampai 2019. Data yang digunakan bersumber dari situs web Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, maka dari itu data ini disebut data sekunder, sebab data yang digunakan dalam penelitian ini sudah diolah sebelumnya. Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung berasal dari sumbernya tetapi sudah dalam berbagai bentuk olahan, seperti data statistik yang disediakan oleh kantor pemerintah dan biro jasa data (Daniel 2002). Data yang diambil oleh peneliti yakni data Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya, yang berupa data rencana anggaran total pendapatan, realisasi total pendapatan, realisasi total belanja, realisasi total PAD dan total pendapatan transfer tahun anggaran 2015-2019.

Menurut (Sugiyono 2013) tujuan dasar dari adanya penelitian ialah memperoleh data, sehingga teknik pengumpulan data menjadi langkah utama pada suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dapat berbentuk survey, angket, wawancara, dokumentasi dan lembar observasi. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi, menurut (Sugiyono 2015) teknik pengumpulan data melalui dokumentasi adalah upaya mendapatkan data atau informasi yang berbentuk dokumen, buku, berkas, catatan berupa angka dan gambar yang membantu dalam penelitian. Dokumentasi yang digunakan peneliti berasal dari tulisan, transkrip, buku, jurnal dan data yang berasal dari situs web Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, situs web Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, serta data-data lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian.

Suatu cara dan rangkaian yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang

sedang dilakukan agar dapat ditarik sebuah kesimpulan disebut teknik analisis data. Analisa data yang digunakan pada penelitian ini ialah metode deskriptif, menurut (Sugiyono 2005) metode deskriptif ialah sebuah metode yang berguna untuk menggambarkan hasil penelitian dengan uraian kalimat tetapi bukan untuk kesimpulan yang jangkauannya lebih luas. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan rasio keuangan, berupa:

1. Rasio Efisiensi

Pada rasio efisiensi menjelaskan tingkat kinerja keuangan daerah dengan menghitung perbandingan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan. Tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Halim 2001):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Menurut (Kepmendagri 1996) bahwa kinerja keuangan daerah dapat dikatakan efisien jika hasil efisiensi kurang dari 100%, artinya semakin kecil hasil persentase maka tingkat efisiensi semakin baik dan dikatakan tidak efisien apabila presentase efisiensi cenderung tinggi atau lebih dari 100%. Penetapan kategori dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3 Kriteria Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah

Presentasi Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
100- ke atas	Tidak Efisien
90-100	Kurang Efisien
80-90	Cukup Efisien
60-80	Efisien
Dibawah 60	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

2. Rasio Efektivitas

Pada rasio efektivitas menjelaskan tingkat kinerja keuangan daerah yang dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan pada rencana anggaran pendapatan. Tingkat efektivitas anggaran dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Halim 2001):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Rencana Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kinerja keuangan daerah Kota Surabaya dapat dikatakan efektif jika hasil persentase efektivitas mencapai 100%, artinya semakin besar hasil persentase maka tingkat efektivitas semakin baik, namun dikatakan tidak efektif apabila presentase efektivitas cenderung menurun atau kurang dari 60%. Penetapan kategori dapat dilihat pada tabel 1.4 sebagai berikut (Kepmendagri 1996):

Tabel 1.4 Kriteria Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah

Presentasi Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
100- ke atas	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
Dibawah 60	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD)

Pada rasio kemandirian keuangan daerah menjelaskan tingkat kinerja keuangan daerah yang diukur dengan membandingkan pendapatan asli daerah pada biaya transfer dan bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Halim 2002):

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Pada rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi hasil persentase menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, namun jika hasil persentase cenderung menurun maka tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah pada bantuan pemerintah pusat dan provinsi semakin tinggi. Untuk melihat kategori penilaian dapat dilihat pada tabel 1.5 sebagai berikut (Undang-Undang Nomor 33 2004):

Tabel 1. 5 Kriteria Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Daerah

Kemandirian (%)	Kemampuan Daerah
0%-25%	Instruktif (Pemerintah Pusat mendominasi segala hal pembiayaan daerah)
25%-50%	Konsultatif (Pemerintah Pusat sedikit berkurang ikut campur keuangan daerah)
50%-75%	Partisipatif (Kedudukan Pemerintah Pusat sudah sangat berkurang dalam membantu pembiayaan daerah)
75%-100%	Delegatif (Pemerintah Daerah mendominasi keuangan daerah, tanpa campur tangan Pemerintah Pusat)

Sumber: UU No. 33 Th 2004.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Efisiensi Anggaran Daerah Pemerintah Kota Surabaya

Analisis efisiensi anggaran daerah menjelaskan tingkat kinerja keuangan daerah dengan menghitung perbandingan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan.

Dalam mengukur tingkat efisiensi keuangan daerah dilakukan dengan cara membandingkan biaya pengeluaran dengan realisasi pendapatan daerah yang diterima.

Tabel 1. 6 Tingkat Efisiensi Anggaran Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2019

Tahun	Efisiensi Anggaran Belanja		%	Keterangan
	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan		
2015	6.490.359.759.532,00	6.619.031.160.936,97	98,05	Kurang Efisien
2016	7.151.661.549.430,48	6.825.754.275.891,53	104,77	Tidak Efisien
2017	7.912.409.152.257,09	8.033.573.163.669,67	98,49	Kurang Efisien
2018	8.176.929.496.298,63	8.175.219.120.669,10	100,02	Tidak Efisien
2019	9.162.655.939.831,57	8.765.153.020.782,67	104,53	Tidak Efisien

Sumber: Data Diolah, 2021.

Berdasarkan tabel 1.6, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi anggaran daerah Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan, mengalami kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2016 yakni dari 98,05% naik menjadi 104,77%, yang semula berada pada kategori kurang efisien menjadi tidak efisien, kemudian di tahun 2017 tingkat efisiensi berada di angka 98,49% sehingga kembali pada kategori kurang efisien, dan di tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami kenaikan, dari 100,02% menjadi 104,53%, sehingga kembali yang berada pada kategori tidak efisien. Tingkat efisiensi anggaran daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019 berkisar pada rata-rata rasio sebesar 101,172%, nilai presentase tersebut masuk pada kategori tidak efisien. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Surabaya kurang efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Surabaya. Tahun anggaran 2015-2019 keuangan daerah Kota Surabaya apabila dilihat dari tingkat efisiensi tergolong kurang efisien dan tidak efisien. Nilai presentase terendah terjadi pada tahun 2015 yakni dengan presentase sebesar 98,05% yang masuk pada kategori tidak efisien dan nilai presentase tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni dengan presentase sebesar 104,77% yang masuk pada kategori kurang efisien.

Adapun penyebab tingkat efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya tergolong kurang efisien bahkan tidak efisien ialah adanya pemborosan di beberapa sektor, seperti sudah tersedianya fasilitas yang sudah memadai tetapi masih ada anggaran untuk renovasi dan pengembangan, hal ini dapat dilihat dari besarnya anggaran belanja barang yang setiap tahunnya terus mengalami kenaikan, yakni tahun 2016 dengan nominal Rp.2.956.213.760.468 naik sebesar 21,67% dari tahun sebelumnya, kemudian tahun 2017 naik sebesar 11,55% dari tahun 2016 dengan nominal Rp. 3.360.370.631.852 kemudian tahun 2018 naik sebesar 14,60% dari tahun 2017 dengan nominal Rp.3.666.769.874.931 dan juga tahun 2019 naik sebesar 13,33% dari tahun 2018 dengan nominal Rp. 4.088.673.664.945 dengan demikian rata-rata kenaikan anggaran belanja barang dan jasa setiap tahunnya naik sebesar 15,29%. Kemudian penyebab ketidakefisienan anggaran yaitu besarnya pengeluaran belanja pegawai dengan kenaikan rata-rata setiap tahunnya sebesar 2,63% dengan nominal tahun 2015 Rp. 2.579.203.525.763, tahun 2016 Rp. 2.711.905.402.999, tahun 2017 Rp. 2.561.530.634.574, tahun 2018 Rp. 2.635.973.536.954 dan tahun 2019 Rp. 2.713.569.439.655. Belanja pegawai tersebut didominasi seperti kepentingan perjalanan dinas atau kegiatan pegawai pemerintah seperti rapat di luar kantor serta penyediaan kendaraan dinas baru di instansi pemerintahan. Besarnya angka realisasi

anggaran belanja dari total realisasi anggaran pendapatan yang diterima pemerintah menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Kota Surabaya masih sangat kurang dan terkesan adanya pemborosan, hal ini sama saja mengabaikan azas penghematan dan efisiensi anggaran belanja daerah. Meskipun Pemerintah Surabaya berhasil merealisasikan target anggaran belanja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun akan menjadi tidak berarti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk merealisasikan target anggaran belanja lebih besar nilainya dari realisasi anggaran pendapatan yang diterima.

Analisis Efektivitas Anggaran Daerah Pemerintah Kota Surabaya

Pada analisis efektivitas anggaran daerah menjelaskan tingkat kinerja keuangan daerah yang dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan pada rencana anggaran pendapatan. Pengukuran tingkat efektivitas dinilai efektif apabila suatu organisasi, program atau kegiatan yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Maka dengan adanya kontribusi output yang besar terhadap pencapaian tujuan, mengakibatkan suatu organisasi semakin efektif, baik dari program atau kegiatannya.

Tabel 1.7 Tingkat Efektivitas Anggaran Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Efektivitas (Pendapatan)		%	Keterangan
	Realisasi Pendapatan	Rencana Anggaran Pendapatan		
2015	6.619.031.160.936,97	6.642.257.716.374,00	99,65	Efektif
2016	6.825.754.275.891,53	6.720.301.543.490,00	101,57	Sangat Efektif
2017	8.033.573.163.669,67	7.904.894.969.358,00	101,63	Sangat Efektif
2018	8.175.219.120.669,10	8.079.142.194.268,00	101,19	Sangat Efektif
2019	8.765.153.020.782,67	8.733.224.623.734,00	100,37	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah, 2021.

Berdasarkan tabel 1.7 diatas, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas anggaran daerah Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan realisasi pendapatan, mengalami kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2016 yakni dari 99,65% ke 101,57%, yang semula berada pada kategori efektif menjadi sangat efektif, kemudian di tahun 2017 mengalami peningkatan yakni sebesar 101,63%, sehingga kembali pada kategori sangat efektif, sedangkan di tahun 2018 tingkat efektivitas kembali menurun menjadi 101,19%, begitu juga di tahun 2019 mengalami penurunan dengan tingkat efektivitas sebesar 100,37%, akan tetapi presentase di tahun 2018 dan 2019 masih termasuk dalam kategori sangat efektif. Tingkat efektivitas anggaran daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019 berkisar pada rata-rata nilai rasio sebesar 100,88%. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Surabaya dapat dikatakan sangat efektif dalam pengelolaan realisasi pendapatan Kota Surabaya, karena rata-rata berada pada nilai maksimum rasio efektifitas yaitu diatas 100%, hanya saja pada tahun 2015 berada pada nilai kurang dari 100% dengan nominal anggaran Rp.6.642.257.716.374 dan nominal realisasi sebesar Rp.6.619.031.160.936 tetapi masih masuk pada kategori efektif.

Berdasarkan rasio efektivitas anggaran daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019, tahun anggaran 2017 memiliki tingkat efektivitas anggaran tertinggi

dengan nilai rasio sebesar 101,63%, nominal anggaran sebesar Rp. .033.573.163.669 dan nominal realisasi sebesar Rp.7.904.894.969.358. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik dalam rangka merealisasikan tujuan total pendapatan yang telah ditetapkan daripada 2 tahun anggaran sebelumnya dan 2 tahun anggaran setelahnya. Sedangkan tingkat efektivitas yang paling rendah terjadi pada tahun anggaran 2015 dengan tingkat rasio sebesar 99,65%, dengan rasio tingkat kemandirian keuangan tahun anggaran 2015 tersebut masih berada pada kategori efektif.

Berdasarkan rata-rata nilai tingkat efektivitas Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019 berada pada nilai maksimum yaitu diatas 100%, hal ini dapat dilihat dari terlaksanakan program yang ditargetkan pemerintah yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, agama, seni budaya, olahraga dan pemuda, kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas penataan ruang, peningkatan kualitas lingkungan perkotaan, penataan kawasan tepian sungai, pembangunan sarana dan prasarana transportasi serta manajemen transportasi, dan juga peningkatan dan pengembangan pelayanan air bersih, pengembangan sektor industri, perdagangan dan jasa, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pariwisata. Oleh karna itu, dapat diketahui bahwasanya hasil program realisasi pendapatan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019 telah tercapai.

Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya

Pada analisis kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya menjelaskan tingkat kinerja keuangan daerah yang diukur dengan membandingkan pendapatan asli daerah pada biaya transfer pinjaman dan bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah Pemerintah Kota Surabaya dalam penerapan otonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut dalam membangun daerahnya tanpa biaya transfer dan bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi secara mandiri.

Tabel 1. 1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Kemandirian Keuangan Daerah		%	Kemandirian
	Realisasi Total PAD	Realisasi Jumlah Pendapatan Transfer		
2015	4.035.649.478.397,97	2.558.578.800.539,00	157,73	Sangat Tinggi (Delegatif)
2016	4.090.206.769.387,53	2.730.547.506.504,00	149,79	Sangat Tinggi (Delegatif)
2017	5.161.844.571.171,67	2.821.706.827.498,00	182,93	Sangat Tinggi (Delegatif)
2018	4.973.031.004.727,10	2.971.893.970.892,00	167,33	Sangat Tinggi (Delegatif)
2019	5.381.920.253.809,67	3.104.324.585.538,00	173,37	Sangat Tinggi (Delegatif)

Sumber: Data Diolah, 2021.

Berdasarkan pada tabel 1.8 mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya berkisar pada rata-rata nilai rasio sebesar 166,23%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kemandirian daerah Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan sosial masyarakat tergolong sangat tinggi, yang mana masuk pada kategori delegatif, artinya peranan pemerintah pusat sudah tidak ada, dengan kata lain pemerintah daerah telah mampu/mandiri dalam membiayai kebutuhan daerahnya, karena rata-rata berada pada nilai maksimum rasio kemandirian keuangan daerah yaitu diatas 100%. Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019, tahun anggaran 2017 memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggi dengan nilai rasio sebesar 182,93%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2017 memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang lebih baik dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat daripada 2 tahun anggaran sebelumnya dan 2 tahun anggaran setelahnya. Peningkatan kemandirian keuangan daerah pada tahun anggaran 2017, disebabkan oleh meningkatnya realisasi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2017 yang cukup tinggi yakni sebesar 26,20% dari tahun sebelumnya dengan nominal sebesar Rp.4.090.206.769.387 menjadi Rp.5.161.844.571.171. Peningkatan PAD tahun 2017 yang cukup tinggi tersebut berasal dari peningkatan pos Pendapatan Retribusi Daerah, dimana pos tersebut mengalami peningkatan sebesar 64,38% dengan nominal realisasi Rp.557.966.574.669 daripada tahun 2016 yang hanya Rp.339.453.230.305. Selain itu, pada pos Lain-lain PAD yang Sah, juga mengalami peningkatan sebesar 41,18% dengan nominal Rp.873.538.562.155, dan untuk pos Pendapatan Pajak Daerah, hanya meningkat sebesar 19,85% dengan nominal Rp.3.595.670.492.734. Sedangkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang paling rendah terjadi pada tahun anggaran 2016 dengan tingkat rasio sebesar 149,79%, tetapi pada tahun 2016 PAD Kota Surabaya meningkat sebesar 1,35% dengan nominal sebesar Rp.4.090.206.769.387 dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh tidak sebandingnya peningkatan PAD dengan peningkatan bantuan pemerintah pusat/provinsi sebesar 6,72% dengan nominal sebesar Rp.2.730.547.506.504 dari tahun sebelumnya. Meskipun begitu, nilai tingkat kemandirian tersebut masih sangat tinggi dan berada pada kategori delegatif. Hal ini diperkuat dengan grafik yang penulis cantumkan pada Gambar 4.3 mengenai rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019. Pada gambar tersebut, diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019 relatif sangat tinggi (delegatif)

Simpulan

Dilihat dari rasio efisiensi menunjukkan bahwa keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019 berkisar pada rata-rata rasio sebesar 101,172%, nilai presentase tersebut berada pada kategori tidak efisien, karena nilai rata-rata lebih dari 100%. Pada tahun 2015 masuk kategori kurang efisien karena nilai rasio berada diantara 90-100%, tahun 2016 nilai rasio meningkat dan masuk kategori tidak efisien, pada tahun 2017 nilai rasio efisiensi menurun dan masuk kategori kurang efisien. Sedangkan tahun 2018 dan 2019 nilai rasio efisiensi kembali meningkat dan masuk kategori tidak efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019 belum mampu memenuhi indikator efisien yakni menggunakan dana yang minimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya pemborosan di beberapa sektor, seperti sudah tersedianya fasilitas yang sudah memadai tetapi masih ada anggaran untuk renovasi dan pengembangan, hal ini dapat dilihat dari besarnya anggaran

belanja barang yang setiap tahunnya terus mengalami kenaikan, selain itu ketidakefisienan juga disebabkan oleh besarnya pengeluaran belanja pegawai, belanja pegawai tersebut didominasi seperti kepentingan perjalanan dinas atau kegiatan pegawai pemerintah seperti rapat di luar kantor serta penyediaan kendaraan dinas baru di instansi pemerintahan.

Dilihat dari rasio efektivitas diketahui bahwa keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019 menunjukkan nilai rata-rata efektivitas sebesar 100,88% yang berada pada kategori sangat efektif, karena nilai efektivitas lebih dari 100%. Pada tahun 2015 nilai rasio efektivitas kurang dari 100% tetapi masih masuk pada kategori efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah mampu menjalankan tugas pemerintahannya secara efektif dalam upaya merealisasikan program dan tujuan yang diharapkan.

Dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Surabaya terhadap Pemerintah Pusat berada pada kategori delegatif, yakni tidak ada campur tangan atau bantuan Pemerintah Pusat, hal ini dikarenakan nilai rata-rata kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019 sebesar 166,23%. Masyarakat Kota Surabaya sangat antusias dalam berpartisipasi membayar pajak dan retribusi. Sehingga dengan dukungan tersebut Kota Surabaya mampu membiayai segala kebutuhan daerah tanpa bantuan atau pinjaman dari Pemerintah Pusat.

Daftar Pustaka

- Badrudin, Rudi. 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Daniel, Moehar. 2002. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. 3rd ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Junaidi M., Muhammad, and Ronal. 2020. "Pengaruh Reward Dan Punishment (Penghargaan Dan Hukuman)." *Kapital: Jurnal Ilmu Manajemen* 2(1):6.
- Kepmendagri. 1996. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan*.
- Kurnia, Sri. 2016. "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dengan Menggunakan Metode Value for Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang." Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: ANDI.
- Mulyadi. 2009. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: STIE YPKPN.
- Nazir, Muhammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah RI. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- Purnomo, Slamet Hadi. 2019. "APBD Kota Surabaya 2019 Capai Rp. 9,4 Triliun." Retrieved April 23, 2021 (<https://jatim.antaranews.com/berita/267238/apbd-kota-surabaya-2019-capai-rp94-triliun>).
- Rozack, Abdul. 2018. "APBD 2018 Naik, Difokuskan Untuk Infrastruktur." Retrieved April 23, 2021 (<https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2017/12/01/30666/apbd-2018-surabaya-naik-difokuskan-untuk-infrastruktur>).
- Siregar, Boyke P. 2016. "APBD Suarabaya 2016 Defisit Rp. 1,3 Triliun." Retrieved April 23, 2021 (<https://www.wartaekonomi.co.id/read114651/apbd-surabaya-2016-defisit-rp-13-triliun.html>).
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Undang-Undang Nomor 33, Undang-Undang Nomor. 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah..*